

## WACANA KEKERASAN DALAM KULTUR KELUARGA DAN SEKOLAH

oleh: Arif Rohman<sup>1</sup>

### Abstrak

*Kekerasan sosial* baik pada tataran tindakan maupun wacana yang ada di dalam masyarakat sebenarnya sangat terkait bahkan terkadang dipicu dari praktek di dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan telah mempraktekkan dan mengembangkan wacana kekerasan kepada anak sebagai embrio dari praktek kekerasan di masyarakat.

Dalam kehidupan di sekolah dan keluarga, guru maupun orang tua telah menempatkan dirinya secara berbeda dengan anak. Mereka menampakkan dirinya sebagai sosok 'dominan' yang berhak menguasai terhadap anak serta mengendalikan segenap motivasi dan perilaku anak. Hal inilah yang tergolong sebagai *kekerasan mental* terhadap anak. Bahkan lebih jauh lagi tidak jarang terjadi aneka praktek penyiksaan terhadap fisik anak. Hal ini yang tergolong sebagai *kekerasan fisik*.

Sehingga sekolah dan keluarga sebagai institusi pendidikan formal dan informal dalam kadar tertentu telah melakukan praktek penyimpangan terhadap fungsinya, yang antara lain berupa *kekerasan fisik* dan *mental*.

### Pendahuluan

'*Secara natural, manusia adalah makhluk serakah dan cenderung menyukai konflik dengan sesama*' demikian kata Thomas Hobes dalam bukunya *Leviathan* (Ramlan, 1992:29). Dengan sikap serakah dan egois dari manusia itulah, menurut Hobes, menjadikan orang lain terganggu dan kekacauan antar sesama terjadi. Pernyataan Thomas Hobes ini seakan memberi isyarat dini akan terjadinya aneka pergolakan dan konflik sosial pada beberapa kawasan dunia lebih-lebih di Indonesia dewasa ini.

Fenomena pergolakan dan konflik sosial yang menjurus kepada tindak kekerasan (*violence action*) yang terjadi di banyak kawasan khususnya di Indonesia seperti di Aceh, Jayapura, Banyuwangi, Kupang, Ketapang, Sambas, Ambon, Sampit,

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY

Palangkaraya, serta Poso, semuanya telah membuktikan adanya sinyalemen di atas. Bahkan menurut laporan Kompas (20 September 2000), akibat konflik sosial tersebut telah menelantarkan tidak kurang dari dua juta manusia Indonesia di lapisan bawah.

Secara teoritis, kekerasan sebagai sebuah kenyataan sosial sebenarnya merupakan variabel penting yang melekat pada tingkat masyarakat tertentu. Terutama kepada tipe-tipe masyarakat yang masih berlabel kurang beradab atau masih terbelakang. Berbeda dengan tipologi masyarakat yang sudah mengenal dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sehingga, proposisi teoritisnya adalah '*semakin tinggi tingkat keberadaban masyarakat maka akan semakin maju serta semakin menjunjung tinggi nilai kemanusiaan*'; Sebaliknya '*semakin terbelakang peradaban suatu masyarakat akan semakin menonjolkan kekerasan sebagai penyelesaian masalah*'. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Indonesia ?

Indonesia sebagai bangsa yang dikenal sebagai bangsa beradab serta bangsa yang sudah mencapai derajat modern, justru masih diwarnai aneka kekerasan sosial. Aneka kekerasan dengan segala bentuk dan dimensinya telah terjadi merajalela di negeri ini. Sehingga potret masyarakat Indonesia telah semakin tampak kusam, sebuah bangsa yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa '*santun*' sekarang sebagian masyarakatnya telah berubah menjadi *kanibal* dan *biadab*. Meskipun diakui bahwa menurut Baudrillard (Latif dan Ibrahim, 1996), dalam bangsa modern kekerasan masih tetap ada walau berlangsung dalam kemasan lebih halus (yakni bahasa).

Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa orang-orang Indonesia bisa berubah menjadi demikian *biadab*? Mengapa mereka begitu haus darah serta senang menumpahkan darah dari saudaranya sendiri? Bila jawabannya merujuk kepada Thomas Hobes, tentu nalar kita hanya akan berhenti pada titik naturalitas manusia. Bahwa manusia adalah makhluk dengan *gemus* hewan yang mempunyai naluri dan dorongan bertindak kekerasan, sebagaimana lainnya seperti kambing, kuda, harimau, dan srigala. Sehingga muncul ungkapan '*homo homini lupus*' atau 'manusia adalah

hewan pemangsa bagi sesamanya'. Bila demikian, maka manusia sama dengan hewan, bahkan secara naif bisa ditarik lebih jauh 'manusia adalah hewan'.

Namun bila dilihat susunan dan kedudukan kodratnya, manusia Indonesia merupakan makhluk yang multi-dimensional. Ia memiliki banyak peluang kemungkinan sehingga disebut '*makhluk serba mungkin*' serta banyak menyimpan misteri sehingga disebut juga '*makhluk misterius*' yang berbeda dengan makhluk lain. Sehingga thesis yang menyebutkan '*manusia adalah hewan*' merupakan bentuk pengaburan dan pendistorsian terhadap hakekat makhluk yang bernama manusia pada *satu sisi*, serta pelecehan paling menyakitkan terhadap sosok manusia pada *sisi lain*.

Oleh karenanya, untuk menjawab dua pertanyaan di atas kiranya perlu mendiskusikan terlebih dahulu secara lebih mendalam tentang akar masalah yang menyebabkan kekerasan sosial di Indonesia terjadi.

#### Akar Sebuah Kekerasan Sosial

Banyak kajian yang mencoba menggali bagaimana kekerasan sosial terjadi. Secara teoritis, konflik sosial yang menjurus pada tindak kekerasan disebabkan oleh banyak hal. Soerjono Soekanto (1982:94), menyebut empat macam akar penyebab kekerasan sosial, yaitu: (a) perbedaan pandangan dan ideologi, (b) perbedaan kultur, (c) perbedaan kepentingan (*vested interest*), dan (d) hilangnya nilai-nilai yang mengikat keduanya akibat perubahan sosial.

Pandangan lain menyebutkan bahwa kekerasan sosial disebabkan oleh terbatasnya sumber yang dibutuhkan banyak manusia, misalnya: *jabatan kekuasaan*, *harta benda* (rumah, tanah, dan perhiasan), serta *sumber pertambangan*. Secara empirik antara lain tampak pada beberapa orang ribut demi memperebutkan harta warisan, atau penggunaan kekerasan untuk meraih kekuasaan tertentu, dan sebagainya. Selain itu, faktor kepadatan penduduk (*density of society*), lemahnya norma (*normlessness*), memudarnya solidaritas sosial (*the fading of social solidarity*),



serta hilangnya semangat 'bersatu dalam perbedaan' (*unity in diversity*) juga ikut mendorong terwujudnya kekerasan sosial.

Dalam kajian ilmu sosial, seorang ahli yang bernama Paul Conn (Surbakti, 1992: 151) menyebutkan, bahwa konflik dan kekerasan sosial terjadi akibat adanya kemajemukan sosial di masyarakat, baik *vertikal* maupun *horisontal*. Kemajemukan *vertikal* seperti tampak pada struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Sedangkan kemajemukan *horisontal* terlihat pada struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku, ras, kedaerahan, bahasa, agama, serta gender.

Dalam konteks riil, konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia terutama menyangkut konflik politik serta pertikaian antar etnik dan agama, tidak secara transparan diketahui sebab-sebabnya. Aneka faktor saling terkait tali temali melahirkan kekerasan. Misalnya apakah karena *kesejangan ekonomi* dan *politik* yang menyebabkan kekerasan sosial? Dalam arti apakah karena sebagian kelompok memperoleh peluang kemudahan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik, sementara kelompok lain tidak. Atau, apakah karena sintemen kelompok dan kedaerahan yang berlebihan (*primordialisme*)? Semuanya masih kabur hanya sebatas dugaan dan asumsi, disebabkan belum adanya penelitian mendalam untuk mengetahui sebenarnya akar penyebab konflik dan kekerasan (*underlying causes of conflict and violence*) di Indonesia.

Misalnya, Rahman Nitibaskara (2001), mensinyalir ada dua faktor penyebab munculnya konflik dan kekerasan sosial di Indonesia, yaitu: (a) *faktor struktural*, yakni faktor yang bersifat jangka panjang yang membentuk kondisi kondusif bagi meletusnya konflik dan kekerasan seperti kesenjangan ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya; (b) *faktor pemicu*, yaitu faktor yang berasal dari para aktor di lapangan yang memiliki pengaruh yang dapat memicu meluasnya konflik dan kekerasan.

Selo Soemardjan (2001) juga menyebutkan, bahwa penyebab konflik di Indonesia adalah: (a) adanya unsur budaya milik beberapa kelompok masyarakat yang bertentangan satu sama lain, (b) adanya ketimpangan sosial dimana satu pihak dominan terhadap pihak lain, dan (c) adanya sumber penghidupan yang menjadi rebutan antar masing-masing. Kasus terbaru dari fenomena konflik dan kekerasan sosial adalah pertikaian antarsuku Madura dan suku Dayak di Kalimantan Tengah yang telah merenggut ratusan jiwa tewas terbunuh serta ribuan orang berstatus pengungsi.

Semua penjelasan di atas, hampir semua merujuk kepada akar yang berasal dari masyarakat terhadap berlangsungnya konflik dan kekerasan sosial yang terjadi susul menyusul tersebut. Bagaimana dengan akar penyebab dari dunia pendidikan (sekolah dan keluarga), belum banyak diungkap. Sebab bagaimana pun juga, sedikit atau banyak dunia pendidikan ikut terseret bahkan terlibat dalam kancah konflik kekerasan di masyarakat, apakah sebagai institusi penyebab atau sebagai wilayah yang terkontaminasi sebuah 'limbah' akibat konflik kekerasan di masyarakat tersebut.

Lembaga Pendidikan: Cuci Tangan ?

Perbincangan menyangkut kekerasan sosial sebenarnya tidak luput dari dunia pendidikan, entah itu namanya *sekolah*, *universitas*, maupun *keluarga*. Gejala yang terjadi di masyarakat sudah pasti dapat dirunut dan terkait dengan kinerja lembaga pendidikan yang ada. Meskipun selama ini dunia pendidikan terkesan cuci tangan bahkan mengeluh telah terkena limbah atau eksekutif akibat terjadinya kekerasan di masyarakat. Salah satu yang mereka keluhkan adalah menyalahkan tindak kekerasan dalam dunia pendidikan, khususnya pada tataran wacana oleh para siswa dan mahasiswa.

Diakui memang, akibat banyaknya tindak kekerasan di masyarakat yang telah terekspos melalui media massa, sedikit banyak telah mempengaruhi 'ruang berfikir' para pelajar. Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di masyarakat lambat laun telah

memberikan gambaran dan informasi secara berulang dan terakumulasi yang melahirkan sebuah wacana pada kancah publik yaitu wacana kekerasan (*violence discourse*).

Kekerasan sebagai sebuah wacana bisa berfungsi tidak sekedar berhenti pada tataran kognitif semata, akan tetapi juga berfungsi memberi orientasi, komunikasi, dan pengendalian diri (Latif dan Ibrahim, 1996). Hal inilah sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh dunia pendidikan, yakni adanya bentuk-bentuk lanjut (*player effects*) perilaku para pelajar dengan cara mereproduksi kembali kekerasan, baik pada *tataran wacana* lebih-lebih pada *tataran tindakan*. Sebagaimana hasil penelitian Freedman tahun 1984 dan Reklez tahun 1972 yang menunjukkan bahwa akibat pengaruh informasi dan wacana melalui media massa dalam kurun waktu tertentu dapat mempengaruhi kepribadian, cara berfikir, dan cara berperilaku anak remaja yang mengarah pada kekerasan (Roni Rahman, 2000).

Namun, kesemuanya itu tidak serta merta menjadikan dunia pendidikan dengan congkaknya dapat menuding pihak masyarakat lah yang menyebabkan tindak kekerasan terjadi. Dengan kata lain, sebab-sebab di luar proses pendidikan seperti sosial, ekonomi, dan politik lah yang memicu terjadinya kekerasan sosial. Sehingga, dunia pendidikan dengan mudah mengelak dan cuci tangan sebagai pihak yang tidak berdosa sama sekali, bahkan mengaku terkena limbah dari ekses-ekses keseluruhan proses sosial, ekonomi dan politik tersebut yang pada akhirnya mengotori dunia pendidikan. Tetapi yang sebenarnya adalah dunia pendidikan lah sesungguhnya yang ikut melahirkan terjadinya kekerasan sosial di masyarakat.

Sebagaimana disebutkan Fagerlind and Saha (Imam Barnadib, 1987: 87), bahwa pendidikan dan masyarakat merupakan dua hal yang saling terkait dalam mana keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini berarti, bahwa kekerasan sosial masyarakat merupakan variabel pengaruh sekaligus terpengaruh terhadap dunia pendidikan. *Di satu sisi*, kekerasan sosial mempengaruhi kehidupan



pendidikan, begitu juga dunia pendidikan mempengaruhi terjadinya kekerasan sosial *pada sisi lain*.

#### Kultur Kekerasan dalam Keluarga dan Sekolah

Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya terhadap anak-anak adalah *kekerasan fisik* dan *mental*. Kekerasan jenis pertama pada umumnya masih sering terjadi pada beberapa sekolah dan keluarga yang menerapkan disiplin formal dan pola asuh otoriter. Beberapa kali kasus seperti ini sempat terekspose di media massa, terutama mengenai bentuk-bentuk hukuman kepada anak yang bersifat kurang mendidik dan kurang manusiawi.

Hal tersebut bisa ditengok pada kisah tragis tahun 1980-an, di mana seorang anak bernama Ari Hanggara tewas ketika tidak kuat menerima hukuman yang tidak manusiawi—berupa pukulan benda keras dan benturan kepala ke tembok—dari ayah kandungnya sendiri. Kasus lain, dua orang anak dikunci dalam mobil oleh ibunya yang akhirnya meninggal; seorang anak umur 4 tahun yang dijemur di tengah guyurn hujan dan terik matahari; Bahkan kasus terakhir di Jawa Timur, seorang anak bernama Noti dipukuli ibunya sampai sekarat dan masuk rumah sakit (Jawa Pos, Nopember 2001).

Kasus-kasus kekerasan di dalam keluarga di atas sebagian juga terjadi di sekolah. Beberapa kasus sering terekspos di media massa mengenai hukuman fisik yang kadang-kadang kelewatan diberikan oleh guru kepada anak didik. Seperti tamparan, pukulan dengan penggaris kayu, cubitan yang berlebihan, serta aneka bentuk lain telah menyebabkan siksaan kepada anak. Bahkan disinyalir hukuman-hukuman fisik orang tua dan guru tersebut masih sering terjadi sampai sekarang.

Di samping kekerasan fisik, lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal secara tidak langsung juga telah melakukan praktek *kekerasan mental* kepada anak didik. Beberapa bentuk kekerasan jenis ini juga dapat diungkap antara lain telah disebut Paulo Freire, yaitu sekolah telah menciptakan kebosanan, kejenuhan, keterasingan, dan keterkungkungan pada diri anak. Mentalitas anak yang demikian

wenang melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun mental kepada pihak kedua. Hal ini secara moral merupakan suatu pelanggaran.

Aneka bentuk kekerasan fisik dan mental yang diterimakan kepada anak di atas telah menjadi bagian dari kegiatan keluarga dan sekolah secara berulang yang lambat laun mewarnai sisi hitam (*black side*) dari dunia keluarga dan sekolah. Kejadian-kejadian yang mengerikan bagi anak akan terus dikenangnya sampai kapan pun sebagai bagian negatif dari kehidupan keluarga dan sekolah. Meskipun juga diakui masih banyak sisi lain dari kehidupan keluarga dan sekolah yang bersifat positif, namun kesan yang diingat anak terkadang justru hal-hal yang negatif yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, untuk membantu pertumbuhan anak secara wajar dan sehat maka beberapa kelompok LSM dan beberapa kalangan pendidik di perguruan tinggi telah melakukan kampanye untuk menghentikan aneka bentuk perilaku kekerasan fisik dan mental kepada anak.

#### Membangun Kultur Kedamaian

Membangun kultur menurut Koentjaraningrat (1981:27) berarti mewujudkan kebiasaan secara berulang yang didasari oleh suatu nilai tertentu. Sekolah dan keluarga sebagai representasi lembaga pendidikan formal dan informal memiliki sejumlah anggota yang menjalankan kebiasaan-kebiasaan hidup tertentu sebagai suatu kultur. Proses interaksi antar anggota di dalamnya didasari oleh kultur yang dibangun bersama. Sehingga idealnya adalah kultur yang dibangun secara bersama tersebut merupakan kultur kebersamaan (*togetherness culture*) dan kultur kedamaian (*peaceful culture*).

Pertanyaannya adalah mengapa perasaan kebersamaan dan kedamaian antar warga di beberapa sekolah dan keluarga menjadi begitu rendah? Mengapa diantara mereka kurang memberikan apresiasi atas kinerja antar sesama dan cenderung melihat kesalahan sesama untuk diledek, dimaki, dan dicerca yang menjadikan perasaan



sebagian anggota menjadi tertekan? Dengan kata lain, bagaimanakah nilai dasar yang dibangun institusi pendidikan tersebut dalam membina warganya?

Untuk membangun kebersamaan dan kedamaian di dalam keluarga dan sekolah sebagian ahli mensyaratkan perlunya norma dasar yang disepakati bersama sebagai suatu standar normatif. Yakni standar normatif yang menurut Ernest Renan (Ohoitumur, 2001:138) bisa mendorong ke arah timbulnya kebersamaan (*le desire d'etre ensemble*) yang menolak *relasi-konflik* dan mengakui *relasi-solidaritas*. *Relasi-konflik* melihat antara satu dengan lainnya sebagai pesuruh, saingan, atau musuh; sedangkan *relasi-solidaritas* memandang antar sesama sebagai partner, kolega, dan saudara dalam satu institusi keluarga dan sekolah. *Relasi-konflik* cenderung melihat sisi negatif dari sesama, sedangkan *relasi-solidaritas* cenderung memandang sisi positif dari sesama anggota.

Dalam pandangan lain, standar normatif di atas dimaksudkan untuk mengukur apakah peningkatan kapasitas anggota dan pembentukan relasi antar anggota keluarga dan sekolah tersebut bisa menuju ke arah *progresivitas* yang menunjuk kepada perkembangan ideal, atau sebaliknya yakni menuju ke arah *regresivitas* yang menunjuk kepada perkembangan menurun.

Menurut Bernadi dan Bernado (Joko Sri Sukardi, 2002:2), norma dasar yang mengarah kepada *progresivitas* tersebut menunjuk secara maksimal kepada delapan indikator, yaitu: (a) peningkatan prestasi, (b) pertumbuhan pribadi, (c) kuatnya solidaritas, (d) tingginya partisipasi warga, (e) luasnya pemerataan atas sumber dan hasil, (f) tegaknya otonomi, (g) munculnya rasa keadilan, dan (h) diperolehnya kenyamanan dan keamanan.

Sebaliknya norma dasar yang tidak mampu membawa kepada keadaan di atas tetapi justru menuju kepada *regresivitas*, maka hasil yang dicapai akan mengarah kepada delapan indikator berikut, yakni munculnya: (a) penurunan prestasi, (b) keterasingan, (c) fragmentasi, (d) marginalisasi, (e) eksploitasi, (f) penetrasi, (g) pengurangan rasa keadilan, dan (h) rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan.

Sehingga wacana kekerasan yang menjurus pada munculnya perilaku kekerasan di dalam kehidupan keluarga maupun sekolah sebenarnya bisa dipahami dalam konteks ketercapaian dalam memenuhi standar normatif di atas. Lebih-lebih pada munculnya indikator *regresivitas* proses dan hasil dalam kehidupan keluarga dan sekolah. Salah satu hal paling menonjol adalah munculnya *relasi konflik* atau *fragmentasi* antar sesama yang saling memandang negatif satu anggota terhadap anggota yang lain.

Dalam kondisi demikian, masing-masing menganggap dirinya lebih penting dari lainnya dan karenanya menempatkan dirinya lebih tinggi dari lainnya. Norma budaya miliknya dipaksakan agar menjadi norma kelompok dan yang lain harus mengikutinya. Budaya anak dalam keluarga dipaksa ditanggalkan untuk menerima budaya bapak. Begitu juga di sekolah, siswa dipaksa untuk meniru dan mengikuti budaya guru. Padahal menurut Gardner (Suryati, 2002a:1), anak memiliki potensi psikologik dan irama budaya yang multi dimensi (*multiple intelligence*).

Menurut H.Gardner, anak memiliki profil perkembangan yang sifatnya individual. Mereka memiliki latarbelakang psiko-kultural yang berbeda, baik pada tataran *logik, visual, kinestetik, linguistik, ritmik, natural, interpersonal*, maupun *intrapersonal*. Sehingga dengan latarbelakang psiko-kultural yang dimilikinya, mereka tidak bisa dihakimi dan divonis semata-mata hanya menurut ukuran psiko-kultural orang dewasa (orang tua/guru).

Suyata (2001:21-22) menambahkan, pola pendidikan dengan semata-mata memaksakan budaya induk, yakni pola *mainstreaming* dimana budaya orang tua/guru sebagai anutan yang dipaksakan dan budaya-budaya lain menyesuaikan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Prinsip seperti: demokrasi, kebersamaan, keadilan, dan kesetiakawanan sosial dalam wadah keluarga dan sekolah membutuhkan tempat yang lebih tinggi.

Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan dan memahami kondisi anak beserta psiko-kultural yang dimilikinya, kekerasan baik fisik maupun mental kepada anak dalam kehidupan keluarga dan sekolah tidak akan terjadi. Pola-pola asuh yang mengedepankan kedamaian (*peacefulness*), kebermaknaan (*meaningfulness*), dan kebersamaan (*togetherness*) dalam kehidupan dua institusi pendidikan tersebut menurut Gardner (Suryati, 2002b:2) akan menghasilkan tipologi anak yang bertanggung jawab yang pada akhirnya akan menjadi warga negara yang bertanggungjawab pula.

### Penutup

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas pada akhirnya dapat diperoleh beberapa kesimpulan penting yaitu aneka pergolakan dan konflik sosial yang menjurus kepada tindak kekerasan (*violence action*) yang terjadi di Indonesia telah mengkhawatirkan banyak kalangan. Kekerasan sebagai sebuah kenyataan sosial sebenarnya merupakan variabel penting yang melekat pada tingkat perkembangan masyarakat tertentu, yakni tipe masyarakat yang terutama masih pada tingkat terbelakang.

Beberapa ahli menjelaskan bahwa konflik sosial yang menjurus pada tindak kekerasan disebabkan oleh banyak hal. Soerjono Soekanto (1982:94), menyebut empat macam akar penyebab kekerasan sosial, yaitu: (a) perbedaan pandangan dan ideologi, (b) perbedaan kultur, (c) perbedaan kepentingan (*vested interest*), dan (d) hilangnya nilai-nilai yang mengikat keduanya akibat perubahan sosial. Sedangkan Selo Soemardjan (2001) menyebutkan, bahwa penyebab konflik di Indonesia adalah: (a) adanya unsur budaya milik beberapa kelompok masyarakat yang bertentangan satu sama lain, (b) adanya ketimpangan sosial dimana satu pihak dominan terhadap pihak lain, dan (c) adanya sumber penghidupan yang menjadi rebutan antar masing-masing.

Dari aneka kekerasan dan konflik sosial di masyarakat tersebut sebenarnya sedikit banyak dipengaruhi oleh kekerasan dalam institusi sekolah dan keluarga.



Sekolah dan keluarga sebagai institusi pendidikan formal dan informal dalam sisi-sisi tertentu telah melakukan penyimpangan fungsinya, antara lain adalah praktek kekerasan terhadap anak (*kekerasan fisik dan mental*).

Untuk menghapus praktek kekerasan terhadap anak di atas, sekolah maupun keluarga menurut Ernest Renan (Ohoitmur, 2001:138) perlu memiliki norma dasar yang disepakati bersama sebagai suatu standar normatif. Yakni standar normatif yang bisa mendorong ke arah timbulnya kebersamaan (*le desire d'etre ensemble*) yang menolak *relasi-konflik* dan mengakui *relasi-solidaritas*.

*Relasi-konflik* melihat antara satu dengan lainnya sebagai pesuruh, saingan, atau musuh; sedangkan *relasi-solidaritas* memandang antar sesama sebagai partner, kolega, dan saudara dalam satu institusi keluarga dan sekolah. *Relasi-konflik* cenderung melihat sisi negatif dari sesama, sedangkan *relasi-solidaritas* cenderung memandang sisi positif dari sesama anggota.

Menurut H.Gardner, anak memiliki profil perkembangan yang sifatnya individual. Mereka memiliki latarbelakang psiko-kultural yang berbeda, baik pada tataran *logik, visual, kinestetik, linguistik, ritmik, natural, interpersonal*, maupun *intrapersonal*. Sehingga dengan latarbelakang psiko-kultural yang dimilikinya, mereka tidak bisa dihakimi dan divonis semata-mata hanya menurut ukuran psiko-kultural orang dewasa (orang tua/guru).

Pada akhirnya, dengan mempertimbangkan dan memahami kondisi anak beserta psiko-kultural yang dimilikinya, kekerasan baik fisik maupun mental kepada anak tidak akan terjadi. Pola-pola asuh yang mengedepankan kedamaian (*peacefulness*), kebermaknaan (*meaningfulness*), dan kebersamaan (*togetherness*) dalam kehidupan keluarga dan sekolah akan menghasilkan tipologi anak yang bertanggung jawab yang selanjutnya kelak akan menjadi warga negara yang bertanggungjawab.

## Daftar Pustaka

- Joko Sri Sukardi. 2002. "Refleksi Terhadap Kondisi Iklim Sosio-Budaya Akademik Sekolah". Makalah diskusi tanggal 2 Pebruari 2002.
- Koentjaraningrat. 1981. "Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan". Jakarta: Gramedia.
- Ramlan Surbakti. 1992. "Memahami Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia.
- Selo Soemardjan. 2001. "Penyelesaian Konflik Etnik dan Agama". Artikel, harian Kompas. (Tanggal dan bulan tidak terlacak).
- Soerjono Soekanto. 1982. "Pengantar Sosiologi". Jakarta: Rajawali.
- Suryati Sidharto. 2002b. "Menciptakan Lingkungan sebagai Strategi Instruksional Yang Didasari oleh Multiple Intelligence Bagi Anak Pra Sekolah". Makalah diskusi tanggal 9 Januari 2002.
- Suryati Sidharto. 2002b. "Multiple Intelligence pada Anak Usia Dini". Malakah Sarasehan yang diselenggarakan WSPK Lemlit UNY, tanggal 17 Januari 2002.
- Suyata. 2001. "Pendidikan Multikultural dan Reintegrasi Nasional: Implikasi Kebijakan". Naskah Pidato sebagai Guru Besar UNY, yang disampaikan tanggal 18 Agustus 2001.
- Yong Ohoitmur. 2001. "Panggilan Bersama Membangun Persaudaraan Sejati" dalam Sumartana, dkk (ed.). 2001. "Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia". Yogyakarta: Interfidei.
- Yudi Latief dan. I.S. Ibrahim (ed). 1996. "Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru". Bandung: Mizan.